



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU
PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA

1721-A2

NOMOR : H.01

2 0 0 0 0 0 0 6 7 9

H.02



SPT Pembetulan Ke- 0

H.03



Pembatalan

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

[mm-mm]

H.04

0 1 - 1 2

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN

[yyyy]

H.05

2 0 2 2

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP : 7 3 8 4 1 7 7 9 9 0 0 9 0 0 0

A.2 NIP/NRP : 199312172019021002

A.3 NAMA : AGUNG PUTRA PASARIBU

A.4 PANGKAT/
GOLONGAN : III A

A.5 NAMA JABATAN : 0

A.6 JENIS KELAMIN : ☒ LAKI-LAKI ☐ PEREMPUAN

A.7 NIK :

A.8 STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK
K/ 0 TK/ HB/

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
PENGHASILAN BRUTO		
1	GAJI POKOK/PENSIUNAN	37.249.800
2	TUNJANGAN ISTRI	3.724.980
3	TUNJANGAN ANAK	0
4	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	40.974.780
5	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	2.405.000
6	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	540.000
7	TUNJANGAN BERAS	2.027.760
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	0
9	TUNJANGAN LAIN-LAIN	326
10	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	51.586.550
11	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	97.534.416
PENGURANGAN		
12	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	4.876.721
13	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	1.946.302
14	JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D. 13)	6.823.023
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
15	JUMLAH PENGHASILAN NETO (11-14)	90.711.393
16	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
17	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	90.711.393
18	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	58.500.000
19	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17-18)	32.211.000
20	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	1.610.550
21	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	0
22	PPh PASAL 21 TERUTANG	1.610.550
23	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	
23A	ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	0
23B	ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARAN TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	1.610.550

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSIUN

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

D.1 NPWP Instansi Pemerintah : 0 0 1 1 8 5 5 6 0 0 2 5 0 0 0

D.2 Nama Instansi Pemerintah : SEKRETARIAT JENDERAL KOMINFO SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

D.3 ID Subunit Organisasi :

D.4 Tanggal : 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy

D.5 Nama Penandatanganan : CATUR BUDI PRASETYO

D.6 Pernyataan Wajib Pajak : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



DGRN5MKJ

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.